



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 55 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN WILAYAH KERJA PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2019

BUPATI POLEWALI MANDAR

- Menimbang :
- a. bahwa penyuluh pertanian merupakan proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber lainnya, sebagai upaya meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian di Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2019, maka perlu menetapkan Wilayah Kerja Penyuluh;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 160);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/02/Menpan/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Bersama Menteri Pertanian Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 54/Permentan /OT.210/11/2008 dan Nomor 23 A Tahun 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2018 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Penyuluh Pertanian, Peternakan dan Perkebunan adalah :
- a. melakukan kegiatan persiapan Penyuluhan Pertanian, Peternakan dan Perkebunan;
 - b. melaksanakan Penyuluhan Pertanian, Peternakan dan Perkebunan;
 - c. melakukan evaluasi dan pelaporan; dan
 - d. pengembangan Penyuluhan Pertanian, Peternakan dan Perkebunan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 24 Januari 2019

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 25 Januari 2019

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

